

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan Negara berkembang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk pemerataan distribusi pendapatan dan mengurangi angka pengangguran. Entitas mikro, kecil dan menengah (EMKM) adalah pelaku bisnis yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian Nasional. EMKM merupakan pelaku bisnis yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Siam dan Rahahleh, 2010; Bohusova dan Blaskova, 2012). EMKM memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi di suatu negara, khususnya di negara-negara berkembang (Mazanai dan Fatoki, 2011). Sama halnya dengan Indonesia, dimana EMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan EMKM yang pesat memperlihatkan potensi besar yang dimilikinya, jika potensi tersebut dikelola dan dikembangkan dengan baik tentunya akan menghasilkan usaha yang handal dan kuat. Kedudukannya sebagai pelaku bisnis utama dan tulang punggung dalam kegiatan ekonomi terbukti kontribusi EMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional tahun 2016 meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Pada tahun 2017 jumlah EMKM diperkirakan berkembang mencapai 59 juta. Dari jumlah tersebut mampu menyerap 97,2% dari total tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Berikut disajikan tabel perkembangan EMKM tahun 2005- 2007.

Tabel 1.1 Perkembangan EMKM tahun 2005 – 2007

NO	Indikator	Satuan	2005	2006	2007
1.	Jumlah UMKM	Unit	47 017 062	49 021 803	50 145 800
2.	Pertumbuhan jumlah UMKM	Persen	5,00	4,26	2,29
3.	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	83 586 616	87 909 598	90 491 930
4.	Pertumbuhan jumlah tenaga kerjaan UMKM	Persen	3,90	5,17	2,94
5.	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	979 712,50	1 032 573,90	1 099 301,10
6.	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5,97	5,40	6,46
7.	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	110 338,06	123 767,87	140 363,84
8.	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	15,48	12,17	13,41

Sumber : Data BPS Nasional 2017

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Pemanfaatan sumber alam yang baik dan sumber alam yang berlimpah tidak menjadi sia-sia. Disamping kaya dengan sumber alamnya, penduduk Indonesia memanfaatkan sumber alamnya sebagai wirausaha. Salah satu jenis usaha yang banyak adalah UMKM. Usaha golongan kecil banyak sekali didirikan oleh masyarakat. Kementerian koperasi dan UKM menargetkan supaya meningkatkan peran UKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mendirikan usaha ini sangatlah mudah dan tidak membutuhkan atau mengeluarkan modal yang besar.

Usaha mikro dan kecil adalah salah satu usaha yang banyak didirikan oleh masyarakat terutama dari golongan menengah kebawah. Selain mengeluarkan modal yang tidak besar, usaha ini juga membantu masyarakat yang masih pengangguran dan belum menemukan pekerjaan. Pekerjaan

yang menyenangkan adalah berwirausaha karna, selain mempunyai kreatif yang tinggi, berwirausaha juga tidak terikat dengan orang lain. Dengan mendirikan suatu usaha tanpa terasa sudah membantu perekonomian di Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berkembang di sektor Ekonomi. Salah satu jenis usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM terbukti memiliki peran dan memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia mencapai 56,6 juta. Dari jumlah tersebut, 99,8% merupakan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (LPPI dan BI tahun 2015). UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh krisis moneter, ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

EMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis ekonomi yang menerpa pada tahun 1997-1998. Banyak sektor ekonomi yang ada, hanya EMKM yang mampu berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah EMKM tidak berkurang justru terus meningkat, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Keberhasilan EMKM dalam menghadapi masa krisis tidak serta merta mampu menjaga keberlangsungan usaha EMKM dengan baik. Banyak permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis, baik bersifat internal maupun eksternal. Misalnya aspek keuangan, sumber daya manusia (SDM),

iklim usaha, infrastruktur dan pemasaran sehingga walaupun memiliki peran yang strategis bagi ekonomi namun upaya mengembangkan sektor EMKM juga bukanlah hal yang mudah (Bank Indonesia, 2015).

Pada tahun 2016, Indonesia telah memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MAE), dimana persaingan pasar yang semakin ketat bagi pelaku bisnis 4 khususnya pelaku EMKM. Jika EMKM tidak mau berbenah dan melakukan inovasi dalam mengembangkan usahanya, maka bisa dipastikan banyak pelaku EMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Untuk pengembangan usaha tersebut tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sebagian besar EMKM hanya mengandalkan dana (modal) pribadi dalam menjalankan usahanya, dan tidak ada pemisahan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha dibutuhkan dana yang cukup besar dan adanya pemisahan antara dana pribadi dengan dana perusahaan. Oleh sebab itu, tidak hanya modal pribadi saja yang dibutuhkan tetapi juga membutuhkan dana tambahan dari pihak eksternal seperti pinjaman bank, KUR atau sejenisnya. Namun, fenomena yang terjadi, banyak EMKM yang hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usahanya. Meskipun telah banyak program yang dilakukan pemerintah dalam bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa didapatkan pada beberapa bank tertentu seperti Bank Jatim.

Alasan mendasar mengapa EMKM tidak menggunakan dana atau modal dari pemberi kredit yaitu skala usaha yang masih kecil dan lama usaha yang masih baru (1-3tahun). Alasan lainnya yaitu rumitnya persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit. Salah satu syaratnya yaitu laporan keuangan EMKM yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, banyak EMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan kegiatan usahanya. Penyebabnya yaitu EMKM yang terlalu fokus pada proses produksi dan operasional usahanya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan kegiatan usahanya (Putra dan Kurniawati, 2012). Padahal dengan adanya laporan

keuangan akan mempermudah pemilik dalam memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis.

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan EMKM untuk melakukan pembukuan atau pencatatan akuntansi dalam usahanya yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pasal 48 menyatakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Dan selanjutnya dipertegas pada pasal 49 menyatakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha. Meskipun peraturan dan pencatatan akuntansi telah jelas adanya, namun masih banyak pelaku bisnis enggan melakukan pencatatan atau pembukuan dalam kegiatan usahanya. Hal ini masih sulit dilakukan karena keterbatasan pengetahuan pelaku EMKM, rumitnya proses akuntansi dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi EMKM (Said, 2009; dalam Rudiantoro dan Siregar, 2012). Sudarini (1992) dalam Wahdini & Suhairi (2006) juga membuktikan bahwa perusahaan kecil di Indonesia cenderung untuk memilih normal perhitungan (tanpa menyusun laporan keuangan) sebagai dasar perhitungan pajak dan pengambilan keputusan yang dihadapi oleh pemilik usaha. Studi terhadap penerapan SAK memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan overload (memberatkan) bagi UKM (Fatoni dan Dewi, 2009). Selain itu, beberapa alasan yang diungkapkan oleh EMKM adalah penyediaan sarana dan prasarana pembukuan, harus menyiapkan sumber daya manusia khusus yang paham mengenai pembukuan dan pembuatan laporan keuangan, penggunaan uang yang tidak terstruktur antara pengeluaran operasional kegiatan usaha dengan pengeluaran pribadi

pemilik usaha dan adanya tambahan dana secara tiba-tiba yang harus dikeluarkan.

Terkait kondisi tersebut, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merasa memiliki kewajiban untuk menyusun sebuah standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah agar benefit yang dirasakan oleh pelaku EMKM dalam menerapkan standar akuntansi keuangan tersebut lebih besar dibanding dengan cost yang harus dikeluarkan oleh pelaku EMKM (DSAK IAI, 2013). Untuk mempermudah EMKM dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dan membangun mindset pada EMKM bahwasannya laporan keuangan sangatlah penting, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 24 Oktober 2016 telah mengesahkan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang ditujukan khusus bagi pelaku EMKM dan berlaku efektif per 1 Januari 2018.

Hal ini tentu tidak hanya berguna bagi EMKM dalam rangka memperoleh pemodal. Ketersediaan laporan keuangan yang memadai akan menyajikan informasi data dan keuangan mengenai kondisi perusahaan yang lebih relevan, sehingga pelaku EMKM akan mampu melakukan pengambilan keputusan bisnis secara kongkret terkait pengembangan usaha yang dilakukannya. Dengan demikian potensi EMKM untuk terus tumbuh dan berkembang akan semakin baik dalam jangka panjang.

Disusunnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ini untuk mendorong dan memfasilitasi kebutuhan mencatat, penyajian dan pelaporan keuangan EMKM. Banyak riset yang membuktikan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ternyata belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh EMKM, karena SAK ETAP dianggap masih terlalu kompleks, terlalu berat untuk diterapkan dan tidak sesuai dengan kebutuhan keuangan yang dimiliki oleh EMKM. Dan selanjutnya hasil riset-riset tersebut memberikan rekomendasi untuk penyusunan dan pembuatan suatu

standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan EMKM. Terciptanya SAK EMKM diharapkan dapat membantu entitas untuk menerapkan SAK yang lain yang lebih komprehensif, sebanding dengan perkembangan ukuran usaha dan kompleksitas transaksi bisnis yang sedang dilakukan entitas tersebut. SAK EMKM juga diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong literatur pencatatan dan penyajian laporan keuangan bagi EMKM di Indonesia. Selain itu, SAK EMKM juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi untuk EMKM yang bergerak di berbagai jenis bidang usaha.

EMKM juga merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Jawa Timur. Berdasarkan survei Dinas Koperasi Kota Malang tahun 2015 jumlah EMKM di Kota Paasuruan mencapai kurang lebih 500 unit. Artinya populasi EMKM di Kota Pasuruan baru sekitar 0,3% dari total jumlah penduduk. Padahal Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, jumlah pelaku EMKM idealnya 2% dari populasi penduduk. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pasuruan mendorong pertumbuhan usaha mikro lewat sejumlah pelatihan, berbagai upaya dilakukan agar gerak perekonomian melalui usaha mikro bisa mengalami kenaikan yang signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pelatihan dan berbagai program yang diadakan pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan kegiatan usaha EMKM ini diharapkan para pelaku usaha bisa menangkap peluang yang ada sehingga pertumbuhan usaha kecil bisa membawa dampak positif bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya karena UMKM juga harus membayar pajak, maka penyusunan laporan keuangan bagi UMKM menjadi suatu hal yang menjadi keniscayaan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut maka ditentukan beban pajak yang terutang. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standard baru yg disusun oleh IAI. Ditujukan bagi entitas Mikro Kecil Dan Menengah, standard yang disusun lebih sederhana. Dengan menyusun laporan sesuai SAK EMKM, UMKM dapat mengajukan pendanaan dari pihak lain

maupun sebagai dasar untuk pelaporan pajak. SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang senantiasa mendukung penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (“ED SAK EMKM”) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016.

Dengan disahkannya SAK EMKM ini, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia nantinya akan menjadi lengkap dengan tiga pilar standar akuntansi keuangan, yakni: (a) SAK Umum yang berbasis IFRS, (b) SAK ETAP, dan (c) SAK EMKM. Masing-masing pilar utama tersebut merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di Indonesia, yaitu:

1. SAK Umum yang berbasis IFRS merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan.
2. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaannya.
3. SAK EMKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. ED SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi teknis, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Sebagai bagian dari due process

penyusunan standar akuntansi keuangan, IAI telah mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam kegiatan Public Hearing.

Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. SAK EMKM ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Disusunnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ini untuk mendorong dan memfasilitasi kebutuhan mencatat, penyajian dan pelaporan keuangan UMKM. Banyak riset yang membuktikan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ternyata belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM, karena SAK ETAP dianggap masih terlalu kompleks, terlalu berat untuk diterapkan dan tidak sesuai dengan kebutuhan keuangan yang dimiliki oleh UMKM. Dan selanjutnya hasil riset-riset tersebut memberikan rekomendasi untuk penyusunan dan pembuatan suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM. Terciptanya SAK EMKM diharapkan dapat membantu entitas untuk menerapkan SAK yang lain yang lebih komprehensif, sebanding dengan perkembangan ukuran usaha dan kompleksitas transaksi bisnis yang sedang dilakukan entitas tersebut. SAK EMKM juga diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong literatur pencatatan dan penyajian laporan keuangan bagi UMKM di Indonesia.

Dengan munculnya SAK EMKM dapat menjadi langkah awal untuk mensosialisasikan SAK EMKM yang kemudian diproyeksikan untuk menjadi Standar akuntansi yang bisa berterima oleh masyarakat umum khususnya masyarakat di Indonesia. Dan diharapkan para pelaku usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memahami di dalam penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi untuk UMKM yang bergerak di berbagai jenis bidang usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan SAK EMKM pada usaha mikro kecil menengah UMKM di kota pasuruan (Dinas Koprasi dan UKM kota Pasuruan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab UMKM dikota Pasuruan melakukan penerapan SAK EMKM ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor semua UMKM dikota Pasuruan melakukan penerapan SAK EMKM.
2. Untuk mengetahui apakah UMKM dikota Pasuruan sudah menerapkan SAK-EMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan pertimbangan antara teori yang telah didapat dalam bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.
2. Untuk mengetahui bahwa penelitian ini mampu memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus sebagai referensi yang memadai untuk penelitian lebih lanjut. Dan diharapkan juga mampu untuk ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang usaha mikro kecil dan menengah .

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan pencatatan dan penyajian laporan keuangan SAK EMKM bagi UMKM dikota Pasuruan dalam kegiatan usaha yang dimiliki.
2. Sebagai pertimbangan bagi masyarakat khususnya UMKM dikota Pasuruan dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.
3. Sebagai alternatif dalam rangka efisiensi waktu untuk mengembangkan sebuah usaha yang mampu bersaing di pasar global.
4. Untuk mengetahui bahwa penelitian ini mampu memberikan nilai positif dalam memberikan informasi dan masukan mengenai penerapan SAK EMKM sehingga nantinya bisa bermamfaat dalam peningkatan usaha kecil dan menengah yang ada dikota Pasuruan.